

# Pendampingan Masyarakat Sebagai Fasilitator Pada Kegiatan Musrenbang Di Kelurahan Kenanga Kecamatan Cipondoh Tangerang

Erialdy<sup>\*1</sup>, Tb. Yudi Muhtadi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang Indonesia

\*e-mail : erialdy@unis.ac.id

## Abstract

*The importance of strengthening community capacity related to innovation in sustainable development planning policies in development management is an effort and strategy in reconstructing the process of socio-cultural, economic and political change towards community welfare that is designed on a bottom up or grassroots basis. Musrenbang Kelurahan is a stakeholder communication forum to propose, prioritize and agree on proposals from the results of community meetings at the Rukun Warga (RW) level, there are efforts to solve problems collectively, through a learning process among stakeholders, a process of interaction, discussion and accommodation. Participation is the will of the community to support development programs in planning, implementing, preserving and developing them in the form of cooperation between the government as the policy holder and the community on the other hand as the party who feels the impact of the development policy directly. The role of the Musrenbang Facilitator or Guide is indispensable in managing the Musrenbang stages, at the meeting / deliberation forum activities and arranging the stages and steps of the overall Musrenbang process.*

**Keywords:** Assistance, Facilitator, Development Planning Conference

## Abstrak

*Peran penguatan kapasitas masyarakat dalam kebijakan perencanaan pembangunan berkelanjutan merupakan inisiatif dan upaya strategis untuk menata kembali fase transformasi sosial budaya, fiskal, dan politik bottom-up atau akar rumput dalam kesejahteraan masyarakat. Musrenbang kelurahan merupakan forum komunikasi pemangku kepentingan untuk memberikan pendapat, menyusun kepentingan dan menghasilkan keputusan dari hasil rembuk warga tingkat Rukun Warga (RW), terdapat usaha yang dapat menyelesaikan suatu masalah bersama-sama, menggunakan sebuah alur yang menempatkan antara para pemangku kepentingan, proses interaksi, diskusi dan akomodasi. Mengikuti Musrenbang dengan harapan masyarakat agar berkontribusi dengan program-program pembangunan dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkannya dalam bentuk kerja sama dengan pemerintah yang memiliki andil sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat sebagai yang dapat mengalami dampak langsung dari kebijakan pembangunan yang dilakukan. Peran Fasilitator atau Pemandu Musrenbang sangat diperlukan dalam mengelola tahapan musrenbang, pada kegiatan pertemuan/forum musyawarah dan membuat jadwal dan proses Musrenbang secara keseluruhan.*

**Kata Kunci:** Pendampingan, Fasilitator, Musyawarah Perencanaan Pembangunan

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan masyarakat berbasis sumber daya lokal, potensi lokal, modal sosial, budaya dan kearifan lokal merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan program pembangunan daerah, dengan kolaborasi pemerintah-masyarakat yang efisien dalam pengambilan keputusan strategis terkait potensi sumber daya daerah yang dimiliki dan diprioritaskan untuk dikembangkan sesuai kebutuhan spesifik mereka. Oleh karena itu, kesediaan pemerintah untuk merespon aspirasi dan mengikutsertakan masyarakat dalam proses pertumbuhan, baik di tingkat lokal maupun nasional, merupakan upaya yang efisien untuk menjalin hubungan strategis antara pemerintah dan masyarakat serta mendorong keterlibatan masyarakat luas.

Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) adalah salah satu bentuk pembangunan partisipatif di Indonesia yang dilaksanakan di daerah. Dasar pelaksanaan musrenbang di kota-kota atau kabupaten adalah amanat Undang-undang yang kemudian oleh pemerintah daerah diturunkan dalam bentuk Peraturan Daerah dan Petunjuk Teknis sebagai pedoman bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan musrenbang di daerah. Musrenbang merupakan forum bagi pemerintah, legislatif dan pemangku kepentingan pembangunan (masyarakat) untuk memahami isu-isu dan permasalahan pembangunan daerah dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama tentang prioritas program pembangunan. Musrenbang merupakan alat untuk mensinkronkan antara perencanaan *bottom up* dengan *top down* melalui rekonsiliasi antara kepentingan dan kebutuhan pemerintah dan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan (*citizen participation*) adalah salah satu tonggak demokrasi yang mempengaruhi dinamika dan peran masyarakat dalam kehidupan berbangsa. Efektivitas suatu inisiatif pembangunan tidak hanya bergantung pada kapasitas pemerintah tetapi juga pada keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan (Agustin, 2015). Keterlibatan publik dan keterlibatan pembangunan, termasuk persiapan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan, dapat dianggap sebagai keterlibatan anggota masyarakat (Fadil, 2013). Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan menjadi penting karena pelibatan masyarakat akan mendorong rasa keanggotaan dalam pembangunan, khususnya dalam pengenalan program pembangunan desa (Hardianti, 2017). Peningkatan keterlibatan penduduk merupakan salah satu sarana pemberdayaan sosial yang aktif yang bertujuan untuk mencapai hasil pertumbuhan pedesaan. Mobilisasi perkotaan berupaya untuk membuat penggunaan dan pengelolaan layanan masyarakat pedesaan lebih produktif dan efektif (Martino et al., 2018).

Sebagai bagian dari sistem kemasyarakatan, pemerintah tingkat kelurahan memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya sosial milik masyarakat yang berupa pilar pertumbuhan, standar, adat istiadat, keyakinan, jejaring sosial, toleransi, kolaborasi, dan nilai-nilai lokal lainnya. Perbedaan standar, kolaborasi dan jejaring antar masyarakat dalam kelompok desa yang bersifat sukarela menunjukkan pertimbangan modal sosial dalam proses perencanaan pembangunan. Modal sosial juga dapat digunakan sebagai serangkaian standar, jaringan dan organisasi, di mana individu memiliki akses ke otoritas dan politik (Mardikanto, 2013). Pertumbuhan di tingkat kelurahan berupaya untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas kehidupan masyarakat pedesaan, membangun pelayanan dan infrastruktur, mengembangkan peluang ekonomi lokal, serta memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Fasilitator atau Tim Pemandu adalah salah satu komponen musrenbang Kelurahan. Tim pemandu tidak identik dengan moderator atau ketua. Pemandu adalah perencana dan pengelola mekanisme Musrenbang, yang membuatnya terlibat dan dialogis. Pemandu disebut juga fasilitator. Peran utama pemandu atau fasilitator adalah membantu dan mendorong peserta untuk berpartisipasi aktif dan memastikan musrenbang berjalan dengan lancar (BPPD Tangerang Selatan, 2014). Persyaratan yang perlu dimiliki oleh seorang pemandu musrenbang adalah adanya pengetahuan mendasar tentang musrenbang, mempunyai keterampilan memandu atau memfasilitasi dan adanya sikap yang harus dimiliki sebagai nilai diri. Fasilitator musrenbang biasanya berasal dari gabungan pemerintah tingkat kelurahan dan lembaga swadaya masyarakat kelurahan (bisa dari organisasi kemasyarakatan atau individu terlatih / mampu) untuk menjunjung tinggi prinsip musrenbang, yaitu prinsip kesetaraan, menghargai perbedaan pendapat, berpihak pada masyarakat marjinal, anti-mendominasi prioritas umum.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk berkontribusi dalam penyusunan strategi perencanaan yang partisipatif sebagai pedoman dan saran untuk pembangunan desa bekerjasama dengan masyarakat sebagai fasilitator. Melalui pelibatan masyarakat secara aktif, diharapkan faktor dampak musyawarah dalam perencanaan pembangunan untuk menyalurkan potensi masyarakat di wilayah kelurahan.

## 2. METODE

Untuk melaksanakan kegiatan pendampingan masyarakat sebagai fasilitator dalam penyaluran partisipasi pada kegiatan musrenbang tingkat kelurahan, menggunakan pendekatan *Participatory Rural Appraisal (PRA)* yaitu pendekatan dalam proses pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, yang tekanannya pada keterlibatan masyarakat. Pendekatan PRA tidak lagi melayani masyarakat sebagai obyek penerima program dari atas, melainkan sebagai subyek pembangunan yang merancang program pembangunan dari bawah, dengan terlibat aktif dalam proses perencanaan dan penetapan prioritas program pembangunan, mendorong peningkatan kapasitas masyarakat secara individu. dan dalam kelompok melalui masyarakat partisipatif yang aktif.

Kelurahan Kenanga berada di wilayah Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, terdiri atas enam Rukun Warga. Kelurahan Kenanga adalah kelurahan yang digunakan untuk kegiatan pengabdian masyarakat yang penentuannya didasarkan pada Surat Tugas dari Walikota Tangerang yang diterbitkan oleh Sekretariat Daerah (Sekretariat Daerah, 2020). Pelaksanaan kegiatan pendampingan dimulai dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan April 2020, untuk usulan program pembangunan kelurahan Kenanga 2021.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Proses Perencanaan Pembangunan Kabupaten / Kota (Musrenbang) (Kemenkumham RI, 2014). Pada tahapan Rukun Warga (RW) melalui musyawarah kelompok, musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kabupaten, dan pemerintah kota, proses perencanaan pembangunan dilakukan. Masyarakat harus aktif dalam proses pengambilan keputusan pada tahap perencanaan pertumbuhan desa untuk mendapatkan dukungan dan masukan masyarakat yang baik untuk pembangunan desa. Oleh karena itu, semua kelompok desa diharapkan dapat menciptakan rasa tanggung jawab bersama terhadap wilayahnya.

Pertemuan tahunan perangkat desa untuk merundingkan Rencana Kerja Desa (Renja Kelurahan) tahun anggaran 2021 dilaksanakan di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbang) Kelurahan Kenanga. Hasil diskusi kelompok di tingkat desa dibahas, disusun, disepakati, dan diusulkan untuk perencanaan program. Pemangku kepentingan peserta yang berpartisipasi dan melakukan kontak intensif dengan masyarakat, organisasi, dan orang-orang yang berkepentingan atau mengontrol proses pengambilan keputusan sebagai anggota dalam musyawarah perencanaan pertumbuhan desa.

Fasilitator atau pendamping Musrenbang adalah pimpinan pengelola mekanisme antara tahapan pra dan pasca musrenbang, moderator mimbar atau musyawarah mufakat dan sumber informasi. Sementara itu, fasilitator atau pemandu dari Musrenbang Kelurahan merancang mekanisme musrenbang dan bertugas mengumpulkan tahapan dan tahapan dari keseluruhan proses musrenbang. Bersama-sama, tim pengelola menyusun rencana musrenbang dan menyiapkan bahan serta mendokumentasikan semua temuan musrenbang. Kecamatan selalu diundang untuk fokus pada isu-isu sektor yang berbeda ketika memutuskan topik penelitian dan memastikan partisipasi daerah (Rt / RW) dimasukkan dalam pelaksanaan studi.

Komponen dan Unsur dan peserta Rembug Warga di tingkat Rukun Warga (RW) Kelurahan Kenanga, seperti yang terlihat pada tabel 1 dan gambar 1, di bawah ini:

Tabel 1. Komponen dan Unsur Peserta Rembug Warga

No	Komponen Peserta Rembug Warga	Unsur Peserta Rembug Warga
1	Kepala Kelurahan	Unsur Pemerintahan Kelurahan
2	Sekesrtaris Kelurahan	Unsur Pemerintahan Kelurahan
3	SKPD Kelurahan	Unsur Pemerintahan Kelurahan
4	Fasilitator	Unsur Tim Pemandu
5	Babinkamtibmas	Unsur Keamanan Tingkat Kelurahan
6	Ketua Rukun Warga dan Staf	Unsur Masyarakat
7	Para Ketua Rukun Tetangga dan Staf	Unsur Masyarakat
8	Para Kader Tingkat RW	Unsur Masyarakat
9	Para Tokoh Agama Tingkat RW	Unsur Masyarakat
10	Para Tokoh Masyarakat Tingkat RW	Unsur Masyarakat
11	Para Ibu-Ibu PKK Tingkat RW	Unsur Masyarakat
12	Para Tokoh Pemuda Tingkat RW	Unsur Masyarakat



Gambar 1. Suasana Rembug Warga

Salah satu tugas pokok dalam perencanaan musrenbang adalah mengumpulkan rincian dan atau informasi tentang kelurahan, masalah dan kemungkinan bahan yang relevan dalam penyusunan rencana kerja pembangunan desa (rencana kerja kelurahan). Tindakan yang dilakukan harus melibatkan masyarakat sehingga hal-hal penting yang ada di kelurahan mencapai kesepakatan bersama dan pendapat masyarakat tentang hal-hal yang harus ditangani untuk memperkuat kesehatan masyarakat di kelurahan.

Namun masyarakat membutuhkan pemahaman yang luas tentang pembangunan partisipatif, khususnya di bidang perencanaan, untuk terlibat dalam pembangunan (Maripah, 2017). Pengetahuan publik tentang keterlibatan perencanaan sangat penting untuk pertumbuhan partisipasi, karena perencanaan pembangunan partisipatif meningkatkan persepsi publik tentang nilai keterlibatan kelompok. Keterlibatan masyarakat merupakan sarana untuk menumbuhkan kesadaran tentang keadaan, keinginan dan perilaku masyarakat sekitar. Jika lingkungan aktif dalam proses penjadwalan dan perencanaan, lingkungan dapat lebih percaya pada inisiatif atau program konstruksi. Anda berhak untuk memberi nasihat tentang jenis konstruksi yang akan diterapkan (Sigalingging, 2014).

Tidak hanya membutuhkan konsensus tentang klaim yang dianggap benar dan dapat diterima untuk pencapaian tujuan diskusi, tetapi juga lebih menghormati pandangan yang berbeda. Dalam sesi perencanaan pertumbuhan desa, kekuatan koordinasi anggota paguyuban dan ketua lingkungan kuat (Adams, 2014). Pasalnya, peserta musrenbang kelurahan berasal dari tokoh politik dan pimpinan perusahaan yang sudah saling mengenal, memiliki tujuan dan prioritas yang sama, serta mempengaruhi kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Intensitas kontak yang semakin besar antar peserta dalam proses Musrenbang desa, pengalaman organisasi dan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Pernyataan rencana kerja Kelurahan yang dihimpun berdasarkan hasil perundingan dengan warga tentang masalah prioritas merupakan hasil Musrenbang Desa Kenanga. Tim perumus dan fasilitator menyusun laporan review Renstra Kelurahan dan temuan review RT / RW. Tim perumus harus secara khusus mendasarkan persiapannya pada prioritas dan harapan warga dalam menyusun Rencana Renja Kelurahan Kenanga untuk memberikan dukungan yang konstruktif terhadap hasil Musrenbang. Peserta musrenbang dan gambaran jalannya kegiatan musrenbang tingkat Kelurahan Kenanga, seperti yang terlihat pada tabel 2 dan gambar 2 di bawah ini,



Tabel 2. Peserta Musrenbang Kelurahan

No	Komponen Peserta Musrenbang
1	Kepala Kecamatan
2	Sekertaris Kecamatan
3	SKPD Kecamatan
4	Kepala Kelurahan
5	Sekesrtaris Kelurahan
6	SKPD Kelurahan
7	Fasilitator
8	Babinkamtibmas
9	Kepala Puskesmas
10	Ketua LPM
11	Ketua PKK
12	Ketua Posyandu
13	Koordinator BKM
14	Pokja FKTS
15	Para Ketua Rukun Warga
16	Para Ketua Rukun Tetangga
17	Para Kader
18	Para Tokoh Agama
19	Para Tokoh Masyarakat
20	Ketua Karang Taruna



Gambar 2. Suasana Musrenbang Kelurahan

Perumusan perencanaan pembangunan di tingkat Desa Kenanga difokuskan pada fakta yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan. Strategi pertumbuhan dikembangkan baik dalam bentuk tantangan maupun peluang berdasarkan bukti terkini. Tujuan dari dilaksanakannya penyusunan rencana pembangunan tingkat Kelurahan adalah terpenuhinya kebutuhan layanan publik, baik dalam pelayanan administrasi, pelayanan pembangunan, dan pemberdayaan pada masyarakat. Pertumbuhan kelurahan yang tidak bias dalam membangun hak warganya dalam konteks hak fundamental. Desa-desa berkembang diberi prioritas dalam menangani ketidaksetaraan sosial-ekonomi dalam masyarakat. Hak-hak fundamental tidak diragukan lagi merupakan kebutuhan manusia dan tidak dapat dibedakan antara orang kaya atau miskin, pria atau wanita, ras apa pun, kelompok etnis apa pun. Semua orang memiliki hak-hak fundamental, tanpa kecuali, kebersihan, makanan, sanitasi, dan air, pekerjaan, rumah, tanah dan keamanan, dan keterlibatan, termasuk pendidikan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Musrenbang harus membuat daftar prioritas lingkungan dan bukan hanya apa yang diharapkan masyarakat dari dana yang tersedia (Ma'rif et al., 2010). Masyarakat harus lebih tertarik melakukan musrenbang untuk mengumpulkan masukan sebanyak mungkin tentang program. Tahap pembangunan desa harus menggali kemungkinan dan peluang desa untuk mengoptimalkan kekayaan dan masalahnya (Prahati, Sulaiman Zuhdi, 2017). Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Kenanga, seperti yang terlihat pada tabel 3, di bawah ini:

Tabel 3. Hasil Musrenbang Kelurahan Kenanga untuk Tahun Anggaran 2021.

No	Program Hasil Musrenbang	Jumlah	No	Program Hasil Musrenbang	Jumlah
1	Pembangunan Drainase/Gorong-gorong	30	12	Pelatihan Daur Ulang Sampah Bagi Lansia	1
2	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan	30	13	Pelatihan Ketrampilan PSM	1
3	Pembangunan PJU Lingkungan	7	14	Pelatihan Manajemen Kurban	1
4	Pelatihan Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING)	2	15	Pelatihan Pembibitan Tanaman Pelindung	1
5	Pelatihan Tanggap Darurat Bencana	2	16	Pelatihan Pemilahan Sampah	1
6	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Balita	2	17	Pelatihan Sablon	1
7	Kampung Kader Bina Keluarga Balita (BKB)	1	18	Pelatihan Tata Rias	1
8	Kampung Kader Bina Keluarga Lansia (BKL)	1	19	Pelatihan Manajemen Keuangan Koperasi	1
9	Kampung Kader Bina Keluarga Remaja BKR)	1	20	Workshop Pembuatan Rumah Kebun Bibit	1
10	Pelatihan Usaha Online	1	21	Pengadaan Pojok Baca	1
11	Pelatihan Budaya Ikan Konsumsi	1	22	Pembangunan Lapangan Futsal	1

#### 4. KESIMPULAN

Dalam pendampingan masyarakat sebagai Fasilitator, pelaksanaan musrenbang kelurahan Kenanga dapat terlaksana yang didasarkan pada pedoman dan aturan yang telah disepakati bersama, mulai dari tahap kesiapsiagaan hingga pelaksanaan. Terbuka ruang partisipasi masyarakat dalam memberikan usulan perencanaan pembangunan Kelurahan Kenanga pada setiap tahapannya. Kegiatan rembug warga dan musrenbang baik di tingkat Rukun Warga maupun tingkat Kelurahan Kenanga sudah terwakili oleh unsur masyarakat yang ada di Kelurahan Kenanga, yang menekankan pada terciptanya sinergitas serta interaksi diantara pemangku kepentingan juga kerja sama antar wilayah dan geografi.

Kesepakatan membuat rekomendasi Kelompok dalam Musrenbang Kelurahan Kenanga dengan masyarakat di tingkat yang lebih rendah dari pertemuan masyarakat Rukun Warga (RW), yang kemudian diajukan oleh pengurus RW mewakili mereka di tingkat musrenbang Desa Kenanga, sejalan dengan proses yang ada. Minat masyarakat dalam pembuatan kebijakan berjalan dengan baik dalam rencana kegiatan perencanaan prioritas. Perencanaan pembangunan dilakukan dengan mengacu pada semua peraturan perundang-undangan yang relevan dan etika serta prinsip-prinsip sosial yang ada sehingga konsep besar perencanaan pembangunan dapat dikembangkan dalam menjawab dinamika dan kebutuhan lingkungan yang lebih bersahabat berdasarkan kebutuhan obyektif masyarakat.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Walikota Tangerang yang telah menugaskan sebagai Fasilitator dan memberikan dana dalam kegiatan kegiatan pengabdian masyarakat. Ucapan Terima kasih juga disampi kepada Rektor dan Kepala LPPM Universitas Islam Syekh-Yusuf yang telah memberi banyak dukungan.

#### Daftar Pustaka

- Adams, B. E. (2014). Reason-Giving In Deliberative Forums. *Journal of Deliberative Democracy*, 10(2), 6. <https://doi.org/10.16997/jdd.208>
- Agustin, M. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang. *Publika*, 4(1), 1-14.
- BPPD Tangerang Selatan. (2014). *Bimbingan Teknis Reflikasi Pemetaan Partisipatif Dan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Musrenbang Kelurahan*.
- Fadil, fathurrahman. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal*, 11(8), 287-294. <http://ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/JIPPL/article/view/897>
- Hardianti, S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Program Alokasi Dana Desa Di Desa Buntongi Kecamatan Ampa Kota). *Katalogis*, 5(1), 120-126.
- Kemenkumham RI. (2014). *Undang - Undang No 6 Tentang Desa*.
- Ma'rif, S., Nugroho, P., & Wijayanti, L. (2010). Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kota Semarang. *Riptek*, 4(11), 53-62. [http://bappeda.semarangkota.go.id/uploaded/publikasi/Evaluasi\\_Efektivitas\\_Pelaksanaan\\_Musyawarah\\_Perencanaan\\_Pembangunan\\_\(Musrenbang\)\\_Kota\\_Semarang\\_-\\_SAMSUL\\_M\\_dkk.pdf](http://bappeda.semarangkota.go.id/uploaded/publikasi/Evaluasi_Efektivitas_Pelaksanaan_Musyawarah_Perencanaan_Pembangunan_(Musrenbang)_Kota_Semarang_-_SAMSUL_M_dkk.pdf)
- Mardikanto, T. S. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Maripah. (2017). Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *Jom FISIP*, 4(2), 1-15.

- Martino, Y. A., Sulistiowati, E., & Purnomo, Y. (2018). Model Pemberdayaan Santri Ponpes Al-Hidayah Batu Alang Sebagai Kader Kesehatan Berbasis Terapi Herbal. *JIPEMAS: Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 86. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v1i2.1514>
- Prahati, Sulaiman Zuhdi, A. (2017). Penyuluhan Penyusunan Rencana Pembangunan Desa di desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *Dimamisia*, 1(1), 94–99.
- Sekretariat Daerah. (2020). *Surat Tugas*. Pemerintah Daerah Kota Tangerang.
- Sigalingging, A. H. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi). *Jurnal Administrasi Publik, Volume 2*(Desember 2014), 118.